

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Azra, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia bahkan di dunia, jika menilik jumlah keanggotaannya (Qomar, 2002, p. 17). Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi keagamaan tertua di Indonesia yang terbentuk pada tahun 1926, setelah terbentuknya Sarikat Islam dan Muhammadiyah. Terbentuknya NU merupakan bagian dari perkembangan organisasi Islam di Indonesia. Awal berdirinya Nahdlatul Ulama dalah mulai hilangnya kesepahaman dengan organisasi Islam lain pada masa itu, serta organisasi Islam yang ada dianggap tidak mengakomodir peran ulama.

Dalam pola politik aliran Indonesia, oleh Geertz dibagi menjadi tiga, yaitu abangan, priyayi dan santri. Aliran santri sendiri kemudian dibagi menjadi 2, yaitu santri tradisional, yang seringkali diasosiasikan dengan Nahdlatul Ulama, dan aliran santri modern, yang diasosiasikan dengan Masyumi. Nahdlatul ulama memiliki basis massa di daerah pedesaan, karena dalam kegiatan keagamaan yang dilakukan merupakan akulturasi dengan budaya yang ada di masyarakat. Pendidikan pergerakan NU lebih mengarah pada pendidikan non-formal ala pesantren, yang berisi kajian kitab kuning. Gerakan NU, dalam keanggotaannya lebih bersifat kultural dan” ideologis”. Belum lagi sifat *patron-client* atau paternalistik yang dimiliki penduduk pedesaan yang menjadi warga NU (Esha,

2015, p. ix). Hal inilah yang menyebabkan NU lebih diterima di kalangan masyarakat desa. Dari hasil pengamatan penulis, masyarakat perdesaan lebih bersemangat dan secara sukarela mengikuti kegiatan keagamaan di daripada kegiatan kemasyarakatan yang bahkan diadakan oleh pemerintah setempat. Oleh karena itu dalam upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan, lebih efektif apabila dilaksanakan berkaitan dengan kegiatan keagamaan, pun demikian dengan pemberdayaan perempuan disisipkan pada kegiatan berbasis keagamaan, seperti pengajian sehingga masyarakat lebih tertarik untuk mengikuti. Nalbandian, seperti yang dikutip McGuire bahwa organisasi keagamaan merupakan sumber kekuatan yang baru (McGuire, 2013, p. 119). Asumsi inilah yang membuat, partisipasi masyarakat melalui organisasi keagamaan cenderung menghasilkan *outcome* yang diharapkan masyarakat.

Dalam keberlangsungan untuk mencapai tujuan organisasi, Nahdlatul Ulama disangga dengan tiga pilar penyokong, yakni *Nahdlatul Wathan* sebagai semangat nasionalisme dan politik, *Tashfirul Afkar* sebagai semangat keilmuan dan keagamaan, sedangkan *Nahdlatul Tujjar* sebagai semangat pemberdayaan ekonomi (Esha, 2015, p. 262). Berdasarkan pilar-pilar penyokong organisasi, Nahdlatul Ulama bukan hanya berkuat pada kegiatan keagamaan saja, namun juga kegiatan non-keagamaan dalam usaha pengembangan anggotanya. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama memiliki sejumlah organisasi *underbow* yang memiliki fokus terhadap isu-isu tertentu. Salah satunya yaitu Muslimat NU yang merupakan organisasi *underbow* perempuan NU yang menangani mengenai pemberdayaan perempuan.

Pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh gerakan sosial perempuan berbasis keagamaan tentunya berbeda dengan gerakan sosial perempuan yang bersifat nasionalis. Gerakan sosial keagamaan melakukan pemberdayaan melalui kegiatan yang tentunya bersinggungan dengan nilai keagamaan, misalnya pengajian.

Seperti halnya organisasi induknya, yaitu kepengurusan Muslimat NU terstruktur, mulai dari pusat, provinsi, kota/kabupaten, kecamatan hingga desa/kelurahan. Namun sayangnya, Muslimat NU belum dapat memaksimalkan peran pemberdayaan perempuan, padahal statusnya sebagai organisasi *underbow* NU membuat Muslimat NU memiliki potensi yang kuat untuk menanamkan pengaruh terhadap masyarakat melalui kegiatannya. Namun, fakta di lapangan yang sering ditemui, kegiatan Muslimat NU terutama di tingkat ranting masih sebatas pada penguatan mengenai literasi agama, melalui pengajian.

Namun, ada fakta yang cukup berbeda ditemukan pada kegiatan Muslimat NU di Desa Tuwel, Kabupaten Tegal. Tidak seperti kebanyakan Muslimat NU khususnya tingkat ranting atau desa, dimana biasanya pemberdayaan yang dilakukan masih sebatas penguatan literasi keagamaan melalui pengajian. Muslimat NU Desa Tuwel cukup aktif dalam melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang non-keagamaan. Hal ini coba mereka jewantahkan melalui program kerja organisasi.

Selain Muslimat NU, sejatinya ada badan otonom lain dari Nahdlatul Ulama yang menangani isu-isu perempuan, yaitu Fatayat NU. Perbedaan antara kedua organisasi, baik Muslimat NU dan Fatayat NU terletak pada usia anggota

dan ruang lingkup pemberdayaan, Fatayat NU lebih menekankan pada pemberdayaan penguatan hak-hak reproduksi perempuan, sedangkan Muslimat NU pada , sehingga perbedaan lebih menekankan pada kegiatan yang bersifat praktis, selain itu perbedaan organisasi terletak pada usia keanggotaan. Jika anggota Fatayat NU merupakan perempuan yang telah memenuhi usia diatas 25 tahun atau telah menikah, sedangkan Muslimat NU merupakan lanjutan dari Fatayat NU, anggotanya merupakan perempuan yang berusia diatas 45 tahun.

Perempuan Desa Tuwel sebagian besar merupakan anggota Fatayat NU ataupun Muslimat NU tergantung pada jenjang usianya, prosentasi dapat dikatakan cukup tinggi hingga mencapai 90% jumlah perempuan Desa Tuwel yang menjadi anggota Fatayat NU maupun Muslimat NU (Hj.Bariroh, 2018). Melihat tingginya angka keikutsertaan tersebut, pemberdayaan perempuan melalui Muslimat NU merupakan salah satu metode pembangunan yang yang potensial. Masyarakat secara sukarela dan lebih semangat dalam mengikuti kegiatan Muslimat NU dibandingkan kegiatan pemerintah, banyak kegiatan pemerintah yang kalah pamor dibandingkan kegiatan Muslimat NU maka lebih efektif apabila pemerintah terutama pemerintah desa agar dapat bekerjasama dalam pembangunan desa.

Baik Muslimat NU maupun Fatayat NU memiliki peran yang cukup signifikan dalam pemberdayaan di Desa Tuwel, hal ini tidak lepas dari kondisi social budaya Desa Tuwel yang memang lekat dengan nilai keagamaan, sehingga kedua organisasi berkembang dengan baik di Desa Tuwel. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa peran Muslimat NU Desa Tuwel lebih dominan Fatayat NU

Desa Tuwel. Hal ini kembali lagi di karena keadaan sosial budaya Desa Tuwel. Sifat *patron-client* yang lekat dengan Islam tradisional merupakan salah satu alasannya. Dengan sejumlah lembaga pendidikan pra-dasar binaan Muslimat NU dan ruang lingkup desa yang kecil tidak menutup kemungkinan bahwa anggota Fatayat NU Desa Tuwel dulunya merupakan siswa dari pengurus maupun anggota Muslimat NU yang kebetulan menjadi tenaga pendidikan di lembaga pendidikan binaan Muslimat NU Desa Tuwel. Dalam faham Islam tradisional, penghormatan terhadap guru atau *alim ulama* merupakan sebuah keharusan. Hal ini berdampak pada kerjasama kegiatan pemberdayaan yang dilakukan kedua organisasi. Sehingga, seringkali Muslimat NU yang menjadi inisiator dan penggerak dalam kegiatan pemberdayaan, karena Fatayat NU pasti akan mendahulukan Muslimat NU terlebih dahulu. Sehingga peran Muslimat NU Desa Tuwel lebih mendominasi dalam pemberdayaan perempuan di Desa Tuwel.

Salah satu upaya pemberdayaan perempuan non-keagamaan yang diinisiasi oleh Muslimat NU Desa Tuwel adalah program Bank Sampah. Bank Sampah Muslimat NU Desa Tuwel awalnya merupakan Bank sampah yang diinisiasi oleh anak ranting Muslimat NU Desa Tuwel, yaitu Majelis Ta'lim Nurul Hikmah. Pada awal pembentukan, bank sampah banyak menemui banyak kendala, namun seiring berjalannya waktu adanya Bank Sampah mulai menunjukkan hasilnya terutama sebagai solusi masalah persampahan di Desa Tuwel. Kesuksesan Bank sampah Muslimat NU Desa Tuwel salah satunya dibuktikan dengan Program bank sampah ini mendapat menjadi nominasi Program Kampung Iklim di Jawa Tengah (Info Tegal, 2017).

Program Bank sampah ini juga mampu memberdayakan ibu-ibu sebagai pekerja di Bank Sampah, selain juga sebagai upaya meningkatkan masyarakat yang tanggap lingkungan. Terbukti setelah 2 tahun berjalannya program ini masyarakat memiliki edukasi pemilahan sampah yang baik yang telah diterapkan secara nyata, terbukti dengan kembali bersihnya kali di area desa desa tersebut. Untuk skala pengelolaan Bank Sampah ditingkat desa, bahkan perdukahan apalagi pengelola merupakan organisasi kemasyarakatan, kesuksesan Bank Sampah seperti Muslimat NU Desa Tuwel belum banyak kita temui.

Selain bank sampah, dalam upaya pemberdayaan perempuan Muslimat NU Nurul Hikmah juga mengadakan pembinaan terhadap sejumlah UMKM di Desa Tuwel. Dari keuntungan yang dihasilkan dari Pengelolaan Bank Sampah dan pembinaan UMKM tersebut masuk dalam kas organisasi, dimana dana tersebut dijalankan untuk mendanai kegiatan-kegiatan organisasi. Artinya, setiap kegiatan *filantropis* yang diadakan organisasi tidak membebankan pada iuran anggota, seperti pemberian santunan bagi fakir miskin dan anak yatim, dan donor darah yang rutin diadakan. Selain itu dari kas tersebut mampu membantu kebutuhan anggota, melalui NH kredit. Yaitu sistematis kredit yang diberikan kepada anggota membutuhkan dana, misalnya kebutuhan semen untuk perbaikan rumah. Pemberdayaan perempuan ini membuktikan bahwa perempuan juga mampu berbuat untuk dirinya, namun juga untuk orang lain.

Muslimat NU Desa Tuwel juga aktif berperan dalam pengembangan taman baca di daerah tersebut. Pengelolaan rumah baca diampu oleh pemuda-pemuda

setempat, sedangkan Muslimat NU berperan dalam penyediaan fasilitas yang menunjang kegiatan rumah baca.

Kepengurusan tingkat desa, atau dikenal dengan kepengurusan tingkat ranting merupakan pemberdayaan yang paling utama, karena merupakan pemberdayaan di akar rumput. Masyarakat desa merupakan tingkat masyarakat yang kecil. Masyarakat memiliki informasi penting tentang anggota masyarakat itu sendiri, seperti perilaku, kapasitas, dan kebutuhan (Gintis & Bowles, 2002). Semakin kecil lingkup masyarakat, masyarakat lebih mengetahui kebutuhannya. Pengurus ranting terdiri dari perempuan-perempuan desa tersebut, mampu menggunakan kontrol yang lebih besar atas sumberdaya dan urusan-urusan lokal. Mereka juga dapat menjamin sumberdaya eksternal lebih baik serta memajukan pembangunan sosial di tingkat lokal (Totikidis, Armstrong, & Francis, 2005).

Riset mengenai pemberdayaan perempuan sejatinya telah banyak dilakukan, namun berdasarkan pengamatan penulis masih sedikit riset yang dilakukan terhadap pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh organisasi perempuan *underbow* Nahdlatul Ulama. Salah satunya riset yang dilakukan oleh Miftakhul Huda, mengenai peran spirit *motherhood* Muslimat NU Kabupaten Ponorogo dalam pemberdayaan perempuan. Huda mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan terkait erat dengan konsep *self-efficacy*. Perempuan harus mampu menentukan pilihan dan minat diri, dan menentukan dirinya sendirinya tidak hanya mampu melainkan pula berhak membuat pilihan (Huda, 2015). Argumen Huda ini berkorelasi positif dengan argumen Kabeer bahwa pemberdayaan sejatinya membuat perempuan menentukan pilihan-pilihan

strategis dalam hidupnya yang sebelumnya tidak dapat dijangkau (Kabeer, 2001, p. 19). Hasil riset ini juga mengamini pernyataan UNHCS yang dikutip dalam Mosser, pemberdayaan menstimulasi perempuan ikut aktif dalam kegiatan luar rumah sehingga dapat menunjukkan solusi yang dapat mereka berikan dalam masyarakat. Dalam masyarakat, hal ini meningkatkan kesadaran bahwa perempuan dapat memainkan peran penting dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat.

Molyneux seperti yang dikutip dari Mosser berpendapat bahwa kebutuhan gender dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan strategis gender yang diidentifikasi kebutuhan perempuan berdasarkan posisi sub-ordinate perempuan atas laki-laki di masyarakat, dan kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan perempuan yang diidentifikasi berdasarkan peran perempuan yang diterima di masyarakat (Mosser, 1993, p. 102). Jika kebutuhan praktis lebih bersifat jangka pendek, maka kebutuhan strategis lebih bersifat jangka panjang. Makna pemberdayaan sejatinya adalah apa yang dirangkum pada kebutuhan strategis gender dimana pemberdayaan menekankan pada perubahan dimensi institusional dan ideologi yang lebih dibutuhkan untuk pemberdayaan yang bersifat berkelanjutan dan transformasi sosial yang sebenarnya (Batliwala, 2007, p. 4). yaitu memberi kesadaran pada perempuan bahwa ia mampu menentukan hidupnya sendiri, serta memperoleh hak-hak dan status yang sama di masyarakat.

Pemberdayaan yang bersifat praktis sejatinya merupakan langkah yang secara tidak langsung mengarahkan pada pemenuhan kebutuhan strategis gender (Mosser, 1993, p. 74). Hal inilah yang belum dibahas dalam penelitian

sebelumnya. Penelitian sebelumnya asih berpendapat pada sebagian besar pemberdayaan perempuan yang masih berkuat pada kebutuhan praktis gender. Namun, belum dapat menemukan sejatinya pemberdayaan tersebut memiliki implikasi politik yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan strategis gender. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemberdayaan perempuan oleh Muslimat NU di Desa Tuwel, Kabupaten Tegal serta aspek-aspek politik yang dimaknai dari pemberdayaan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antarlain,

1. Bagaimanakah Peran Muslimat NU Desa Tuwel, Kabupaten Tegal dalam pemberdayaan perempuan?
2. Bagaimana implikasi sosial, ekonomi dan politik program pemberdayaan Muslimat NU Desa Tuwel, Kabupaten Tegal terhadap perempuan setempat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa proses pemberdayaan perempuan di Desa Tuwel, Kabupaten Tegal menuju pemberdayaan yang transformatif.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi penelitian pemberdayaan perempuan melalui perantara organisasi kemasyarakatan.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian dapat menjadi percontohan pemberdayaan perempuan di masyarakat daerah lain.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran pemberdayaan perempuan praktis berorientasi pemberdayaan strategis.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Pemberdayaan

Pemberdayaan dibutuhkan untuk masyarakat miskin dan termarginalkan jika mereka menginginkan perubahan atas keadaan mereka. Kebanyakan pemberdayaan berasal dari komunitas industri. Dalam beberapa kasus, ketidakberdayaan muncul karena kurangnya sumberdaya dan kekuatan formal. Bagaimana perempuan mendefinisikan pilihan prioritas kebutuhannya merupakan hal krusial tentang proses pemberdayaan (Rowlands, 1997, p. 16).

Agar relevan dengan analisis kekuasaan, gagasan mengenai pilihan dapat dibagi menjadi beberapa cara. Yang paling pertama, pilihan secara berdampak pada pilihan alternatif. Ada asosiasi logis antara kemiskinan dengan ketidakberdayaan karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seseorang yang mempengaruhi kemampuan seseorang melakukan hal-hal yang menjadi pilihan prioritas hidupnya (Kabeer, 2001, p. 19).

Beberapa pilihan mempunyai makna yang lebih besar dan berdampak pada hidup orang-orang. Kadangkala, kita dihadapkan harus menentukan antara mana yang menjadi pilihan pertama dan kedua dalam pilihan strategis hidup kita. Disinilah peran pemberdayaan, yaitu memperluas kemampuan manusia untuk

membuat pilihan prioritas yang tadinya terbatas atau sebelumnya ditolak menjadi lebih terbuka (Kabeer, 2001, p. 19).

Salah satu hal yang terbesit apabila mendengar kata "daya" adalah kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan. Berbicara mengenai berdaya, tidak lepas dari keadaan tidak berdaya yang berdampak ditolaknya pilihan yang dibuat. Sehingga, pemberdayaan tidak dapat dipisahkan dengan kondisi ketidakberdayaan yang merujuk pada proses bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan untuk membuat pilihan menjadi memperoleh kemampuan untuk membuat pilihan. Pemberdayaan merupakan sebuah proses. Setidaknya terdapat 3 dimensi pemberdayaan (Kabeer, 2001, p. 20), diantaranya

1. Sumberdaya, sumberdaya bukan hanya merujuk pada sumberdaya ekonomi namun juga sumberdaya material, sosial maupun manusia. Sumberdaya dalam makna yang lebih luas diperoleh melalui banyak cara seperti hubungan sosial yang terbentuk dalam beragam institusi yang membentuk masyarakat. Akses terhadap sumberdaya akan merefleksikan aturan serta norma yang mengatur distribusi serta perubahan sumberdaya dalam masyarakat.
2. *Agency* sering dioperasionalkan sebagai pengambilan keputusan. dimensi perantara dapat dimaknai positif maupun negatif. Dimaknai positif apabila merujuk pada kemampuan seseorang untuk menentukan pilihan hidupnya dan mengejar tujuan mereka, meskipun menghadapi pertentangan. Sedangkan, dalam makna negatif diartikan sebagai kemampuan satu aktor untuk mempengaruhi aktor lain melalui jalan kekerasan, ancaman, dan pemaksaan.

3. Pencapaian (*Achievements*), menurut Sen seperti yang dikutip dari Kabeer menyatakan bahwa adanya sumberdaya dan perantara menjadikan suatu kemampuan serta potensi seseorang untuk hidup sesuai yang mereka inginkan, atau memperoleh nilai dari "*being and doing*" dalam tujuan mereka.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan (Suharto, 2009, p. 58),

- (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam artian bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan,
- (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.
- (c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Parson seperti dikutip dalam Suharto menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluarnya dirinya. Pemberdayaan dapat dilakukan dalam tiga aras atau matra pemberdayaan atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro (Suharto, 2009, p. 66).

1. *Aras mikro*. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.
2. *Aras Mezzo*. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi.
3. *Aras Makro*. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini

1.5.2 Pemberdayaan perempuan

Konsep pemberdayaan perempuan muncul atas meningkatnya kesadaran dan aksi bersama oleh para feminis pada forum pembangunan internasional pada tahun 1970. Namun, konsep pemberdayaan perempuan baru dibahas bersama pada tahun 1980 dan 1990 sebagai sebuah pendekatan yang berfokus pada mentransformasikan hubungan *power* yang berfokus pada isu hak-hak wanita dan peningkatan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

Srilatha Batliwala membuat analisis detail pada program pemberdayaan perempuan di Asia Selatan, melihat pada Pembangunan perdesaan yang terintegrasi (*Integrated Rural Development*) yang terdiri dari intervensi ekonomi,

pembangunan kepekaan, dan pengorganisasian perempuan) dan pada penelitian, pelatihan, dukungan sumberdaya.

Batliwala mencatat bahwa dalam beberapa program *IRD*, kata pemberdayaan dan development digunakan secara sama, sehingga sering diasumsikan bahwa *power* timbul secara otomatis melalui kekuatan ekonomi, namun sejatinya tergantung pada hubungan spesifik yang ditentukan oleh gender, kebudayaan, kelas, dan kasta. Aktivitas ekonomi tidak selalu meningkatkan situasi ekonomi, dan ditambahkan beban lebih. seringnya, pembangunan dilakukan untuk perempuan dan fokusnya pada aktivitas ekonomi tidak mendorong perempuan untuk melihat pada peran gender, dan aspek lain pada hidup mereka. Batliwala mengartikan pembangunan secara bagian praktek pilihan yang telah diinformasikan ke dalam sebuah perluasan kerangka informasi, pengetahuan, dan analisis. Sebuah proses yang memungkinkan perempuan untuk menemukan posibilitas baru, pilihan-pilihan baru. sebuah pertumbuhan makna pilihan.

Batliwala memisahkan antara pemberdayaan personal dan kolektif, dia mendeskripsikan proses pemberdayaan sebagai sebuah spiral daripada sebuah siklus, yang berdampak pada seluruh pihak yang terlibat dalam perubahan, termasuk agen perubahannya: "pemberdayaan bukan merupakan sebuah pengubahan mindset tetapi sebuah demonstrasi yang terlihat dari perubahan dimana dunia didorong untuk mengerti, merespon, dan mengakomodasi apa yang seharusnya dunia lakukan. Batliwala menunjukkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses yang termasuk sebuah redistribusi kekuasaan, yang paling dasar

adalah rumah tangga. Batliwala, menggarisbawahi ketakutan terbesar pemberdayaan perempuan adalah melawan laki-laki.

Batliwala menekankan pemberdayaan awal dimulai dengan pengalaman pribadi perempuan untuk mengerti pengenalan diri dan penggambaran diri yang positif, menstimulasi pemikiran kritis, dan mendalami pemahaman tentang struktur kekuasaan, termasuk gender dan memungkinkan perempuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan isu menjadi sebuah aksi berdasarkan perluasan kepekaan termasuk informasi terbaru, dan pengetahuan) Analisis kritis dan pembuatan keputusan dan mendorong perempuan untuk secara mandiri berjuang untuk perubahan di kondisi material untuk eksistensinya, kehidupan pribadi, dan perlakuan di ruang publik. Batliwala jelas menekankan bahwa pemberdayaan termasuk mengubah kepekaan dan penggambaran diri. Batliwala menjelaskan pemberdayaan termasuk pendekatan paling lambat dan membutuhkan waktu lama untuk melihat hasilnya dibanding pemberdayaan lain.

Pemberdayaan perempuan adalah sebuah proses menggeser sosial *power* dalam tiga cara (Batliwala, 2007, p. 4), yaitu

1. Mengkaji ideologi yang menjustifikasi ketidaksetaraan sosial (seperti gender atau status sosial)
2. Mengubah pola yang berlaku pada akses dan kontrol atas sumberdaya ekonomi, alam, dan pengetahuan
3. Mentransformasikan institusi dan struktur yang menguatkan dan menopang struktur *power* yang ada (keluarga, negara, pasar, pendidikan dan media).

Pemberdayaan yang transformatif tidak diperoleh dengan menghilangkan elemen-elemen tersebut dari sosial *power* bahkan pada tahap awal, para perancang pemberdayaan menjelaskan bahwa tidak ada jalan pintas untuk pemberdayaan perempuan, seperti menyediakan akses terhadap pinjaman, menambah pemasukan, atau pemberian sertifikat tanah. Kerangka pemberdayaan menekankan pada perubahan dimensi institusional dan ideologi yang lebih dibutuhkan untuk pemberdayaan yang bersifat berkelanjutan dan transformasi sosial yang sebenarnya. Cornwall menyatakan bahwa fasilitasi akses terhadap institusi, hukum, dan kebijakan lebih dibutuhkan. Setidaknya, ada 2 cara untuk yang dibutuhkan yaitu,

1. Sebuah proses yang penyadaran. Hal-hal ini termasuk menghilangkan kepercayaan yang mengakar yang mengunci perempuan dalam keadaan subordinasi dan ketergantungan, menantang norma sosial, budaya yang bersifat pelarangan dan melawan kebiasaan yang melanggengkan ketidakadilan.
2. Pertalian dengan kepercayaan, pemahaman, dan ide ide tentang gender, kekuasaan, dan perubahan normatif yang telah tertanam. Hal ini memakan proses perubahan melebihi level individu untuk mengarahkan asumsi yang ada dalam masyarakat yang mengalami ketidaksetaraan gender dalam konteks budaya tertentu.

Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang berlangsung secara sadar dan merupakan kekuatan yang kolektif. Ada desakan bahwa pemberdayaan bukan sesuatu yang diberikan oleh orang lain, namun pemberdayaan adalah tentang penyadaran ketidaksetaraan daya, penegasan hak untuk mendapatkan hak dan

tindakan untuk menekan dan membawa perubahan struktural untuk mencapai kesetaraan yang lebih baik (Cornwall, 2016, p. 344).

Pendapat lain mengenai pemberdayaan juga disampaikan oleh **Naila Kabeer**. Kabeer mengkonstruksikan gagasan kekuasaan untuk menentukan kekuasaan. Pemberdayaan menurut Kabeer merupakan kekuasaan yang bersifat multidimensional yang merupakan kekuasaan dari dalam yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatur sumberdaya, menentukan agenda serta membuat keputusan. Kekuasaan dari dalam merupakan pengenalan dan analisis dari masalah masalah yang perempuan alami dengan situasi subordinasi mereka dan bagaimana mengatasinya, kekuasaan ini tidak dapat diberikan melainkan digenerasikan secara individu. Kabeer tidak mengembangkan kerangka yang spesifik namun menggunakan contoh NGO dan organisasi akar rumput di Asia Selatan untuk mengembangkan konsep pemberdayaan. Hubungannya dengan Gramen Bank di Bangladesh dan SEWA dan SUTRA di India, ia mendiskusikan pentingnya penyediaan kesempatan bagi perempuan untuk didengar dengan penekanan pada proses partisipatori dan identifikasi kebutuhan dengan pendapat bahwa adanya hubungan saling ketergantungan antara kategori kebutuhan berbeda dari pemberdayaan mempunyai implikasi di aspek lain dari pemberdayaan dan terkadang merupakan perluasan dari negasi efek-efek intervensi tersebut.

Kabeer menyarankan identifikasi yang bersifat *bottom-up* yang memposisikan perempuan bersifat kompeten tetapi secara sosial mengalami kendala untuk membuat pilihan mengartikulasikan priorities dan mengambil tanggung jawab. Sebuah

NGO yang inovatif memposisikan diri sebagai agen dan partisipan dalam usaha pembangunan daripada sebagai klien dan penerima. Hal ini sebagai upaya membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab antara perempuan dan aktivitas organisasi. Kabeer juga mengidentifikasi perluasan mobilitas perempuan sebagai fitur yang signifikan, berpergian memainkan peran penting dalam memecah rasa terisolir dan ketidakberdayaan di mana perempuan selalu merasa terjebak.

Kabeer menekankan pentingnya elemen *self-respect*, *sense of Agency*, dalam proses pemberdayaan dan membangun kapasitas organisasi melalui proses kesadaran, dan mendukung pengembangan kepemimpinan, dan memperkuat jaringan. Ada fokus yang kuat dalam dimensi kolektif yang daripada pemberdayaan personal dalam keadaan ketidakberdayaan seseorang memanifestasikan diri sendiri “ dengan perasaan “aku tidak bisa” namun pemberdayaan mengandung elemen kepercayaan diri secara kolektif yang menghasilkan perasaan “ kita bisa”,

Bentuk baru dari kesadaran meningkat pada perempuan agar dapat mendapatkan akses akan sumberdaya seperti skill analisis, jaringan sosial, kekuatan organisasional, solidaritas dan perasaan tidak sendiri. Kabeer menekankan kebutuhan terlibat dalam proyek partisipasi mengarah pada pembuatan kebijakan publik. negara, civil society, dan struktur ekonomi menghambat kehidupan perempuan dan perubahan yang diperoleh dibuat sebagai konteks dorongan. Seperti yang disimpulkan oleh Kabeer bahwa, keberlanjutan jangka panjang dari strategi pemberdayaan akan bergantung pada perluasan pemberdayaan yang mereka dapatkan untuk menantang prioritas-prioritas tersebut.

Namun hanya dapat terjadi apabila partisipasi tersebut dapat mengintervensi agenda pembuatan kebijakan sehingga kepentingan strategis mereka dapat berpengaruh dalam pembangunan.

Konsep pemberdayaan menurut **McWether** adalah sebuah proses dimana perempuan dapat mengorganisasikan diri mereka sendiri untuk meningkatkan *self-reliance*, memperjuangkan hak untuk bebas untuk membuat pilihan-pilihan dan mengontrol sumberdaya yang akan membantu menantang dan menghapus subordinasi mereka.

Jika kebanyakan peneliti, berpendapat pemberdayaan perempuan sebagai sesuatu yang bersifat kolektif. Konsep yang ditawarkan **Mosser** lebih berfokus pada individu. Mosser mendefinisikan pemberdayaan sebagai kemampuan perempuan untuk meningkatkan *self-reliance* dan kekuatan internal. Hal ini diidentifikasi sebagai hak untuk menentukan pilihan dalam hidup dan mempengaruhi arah perubahan, melalui kemampuan memperoleh kontrol atas sumberdaya materiil maupun non-materiil.

Konsep pemberdayaan menurut **Janet Price** juga tentang pengembangan dan pertumbuhan personal dan meningkatkan partisipasi kedalam identifikasi kebutuhan dan arena politik yang lebih luas. Namun konsep price ini menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara kekuasaan internal individu dengan struktur masyarakat yang lebih luas.

Banyak penggunaan terminologi pemberdayaan dalam literatur pembangunan yang masih dalam perdebatan. Contohnya, **Friedman** membahas lebih jauh pengertian pemberdayaan dalam konteks pembangunan sebagai pusat

dari teorinya dimana pemberdayaan merupakan pembangunan alternatif. Dasar analisis Friedman sendiri adalah rumah tangga, dia berpendapat bahwa rumah tangga secara potensial setidaknya memiliki 3 jenis kekuasaan, diantaranya kekuasaan sosial (mencakup informasi, pengetahuan, skill, sumberdaya keuangan, dan partisipasi dalam organisasi sosial), kekuasaan politik (mengacu pada akses pada keputusan-keputusan yang memengaruhi masa depan, apakah melalui pemilihan atau aksi kolektif), dan kekuasaan psikologi (mencakup kepercayaan diri individu). kemudian Friedman,berfokus pada dua yang pertama. pembangunan alternatif yang dia tawarkan pada pemberdayaan rumah tangga dan anggotanya dalam 3 sense yang telah dijelaskan.

Alan Thomas, dalam hubungannya dengan NGO kritis dalam usaha untuk memprentasikan pemberdayaan sebagai sebuah model pembangunan. Dia mengidentifikasi dua pendekatan pembangunan yaitu sebagai alat untuk *self-reliance* yang dikaitkan dengan ide EF Schumacher dan penelitian yang bersifat partisipatif yang merupakan bagian dari ide Freire. Thomas berpendapat pendekatan-pendekatan tersebut sebagai usaha untuk menggunakan partisipasi dari masyarakat lokal sebagai rute terhadap solusi dari masalah-masalah lokal, dimana partisipasi merupakan situasi yang penting dan tidak dapat tergantikan. Namun gambarannya tentang pemberdayaan tidak menjelaskan mengenai jenis pemberdayaan, tetapi fokus pada keterbatasan pemberdayaan itu sendiri termasuk keterbatasan NGO dan kenyataan bahwa banyak masalah lokal terjadi dikarenakan masalah di luar komunitas ini.

Hazel Johnson, secara spesifik melihat pemberdayaan perempuan dalam konteks peningkatan organisasi perempuan dan aksi kolektif di Amerika Latin pada tahun 1997, dimana ia berpendapat pemberdayaan perempuan termasuk mengumpulkan suara, mobilitas dan membangun kehadiran dalam publik. meskipun perempuan dapat memberdayakan diri mereka sendiri dengan memperoleh kontrol atas beberapa aspek dalam kehidupan sehari-hari, pemberdayaan juga mensugesti kebutuhan untuk memperoleh beberapa kontrol atas struktur politik, atau mengubah hal-hal tersebut.

Johnson mengaitkan pemberdayaan dengan aksi kolektif publik melalui individu berdasarkan aksi kolektif kelas, gender maupun identitas lainnya, yang sering didasarkan pada kebutuhan bertahannya keluarga. Menurut Johnson, pemberdayaan adalah suatu proses yang mungkin sangat lambat termasuk penemuan diri dan pembangunan identitas kolektif. aksi publik yang ditimbulkan dari proses ini menantang struktur *power* yang ada dan dapat mengidentifikasi beberapa prioritas pembangunan yang berbeda.

Salil Shetty berpendapat tidak ada definisi tunggal dalam pemberdayaan untuk mencapai keadilan. Dia menawarkan sebuah kerangka analisis yang termasuk dalam gagasan pemberdayaan sebagai sebuah proses : sebuah pendekatan yang holistik yang tidak termasuk dalam siklus proyek konvensional dan konteks yang spesifik. Shetty melihat kerangka analisisnya sebagai sesuatu yang lebih bersifat strategis, dengan penekanan pada demokratisasi dan keberlanjutan, serta elemen psikologis dari pemberdayaan

Shetty membuat pembatas antara pemberdayaan sebagai level grup, dimana dia memisahkan antara pemberdayaan internal dan eksternal serta level individual/rumah tangga. Pendapatnya meninggalkan pertanyaan pada kekuasaan yang tidak tersentuh. Dia menawarkan penggunaan metode partisipasi dalam pengembangan pemberdayaan, tetapi dia juga kritis terhadap pendekatan instrumentalist dari banyak proyek, Shetty gagal untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai hubungan kekuasaan yang diturunkan dalam pembangunan orientasi proyek.

Penelitian yang paling berkaitan, dan spesifik pada pemberdayaan perempuan adalah aktifis dan teoris jaringan **DAWN** dari negara berkembang. Mereka menekankan bahwa pemberdayaan perempuan sebagai asepek penting pada proses yang lambat dari perubahan sosial politik, dan ekonomi dibutuhkan untuk memutarbalikkan visi alternatif kedalam realitas. Mereka menekankan banyak cara melalui organisasi, melalui demokrasi internal, dan proses partisipasi dapat berkontribusi kedalam pemberdayaan perempuan.

1.5.3 Signifikansi pemberdayaan

Ada beberapa wawasan penting mengenai pemberdayaan perempuan, antara lain

1. Pemberdayaan pada dasarnya adalah tentang perubahan hubungan kekuasaan. Pemberdayaan bukan tentang penanggulangan keadaan ketika perempuan mengalami penindasan atau ketidakadilan. Namun, pemberdayaan adalah tentang kemungkinan perempuan mempertanyakan apa yang sebelumnya

mereka anggap normal, dan mulai bertindak untuk mengubah kenyataan tersebut melalui tindakan kolektif sebagai bentuk kepercayaan diri yang mengubah menjadi perasaan “kita(perempuan) bisa”

2. Pemberdayaan bersifat hubungan dalam 2 rasa, yang pertama pemberdayaan berfokus pada hubungan kekuasaan dimana orang-orang berada, dengan apa mereka mengalami ketidakberdayaan atau perasaan perlu membutuhkan “kemampuan membuat pilihan strategis dalam hidupnya” dan ketergantungan pada masa lalu atau masa depan.

3. Kita belajar untuk mengerti bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses, bukan sebuah titik akhir, dimana hasil akhirnya dapat dilihat. Meskipun intervensi-intervensi merupakan perubahan yang legal, kebijakan pendidikan atau inisiasi pembiayaan mikro penguarustamaan perempuan dapat diukur. Seperti yang Mahotra menekankan hal tersebut sebagai “faktor-faktor pembuka” atau “outcomes” tetapi tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari pemberdayaan.

Kontribusi dari aktor dan intervensi eksternal tidak dapat dikategorikan sebagai memberdayakan perempuan, namun sebagai pembersihan beberapa hambatan dari arah dan menyediakan keberlanjutan untuk perempuan seperti mereka melakukan pemberdayaan untuk diri mereka sendiri.

Pernyataan pemberdayaan yang paling dikenal melalui pendekatan pemberdayaan dibuat oleh Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN). Sebuah formasi terpisah dari individu perempuan dan kelompok perempuan merujuk pada pakta Konferensi Perempuan Dunia tahun 1985 di Nairobi. Tujuannya bukan hanya menganalisis kondisi perempuan di dunia,

namun juga membentuk sebuah visi dari sebuah alternatif masyarakat masa depan, yang diidentifikasi tetapi juga membentuk sebuah visi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Kita ingin sebuah dunia dimana ketidaksetaraan berdasarkan kelas, gender, dan ras dihilangkan dari setiap negara dan hubungan antar negara. Kita ingin sebuah dunia dimana kebutuhan dasar menjadi hak dasar dan dimana kemiskinan dan semua bentuk kekerasan dihilangkan. Tiap orang mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas dirinya secara penuh, dan nilai perempuan akan pengasuhan dan solidaritas yang akan mencirikan hubungan manusia. Dalam peran reproduksi wanita dunia seperti itu akan terjadi didefinisikan ulang: pengasuhan anak dibagi dengan laki-laki, Perempuan dalam masyarakat sebagai bagian hanya dengan menajamkan link antara kesetaraan, pembangunan, dan kedamaian, dan ketika menunjukkan bahwa hak dasar dari masyarakat miskin dan transformasi kebiasaan-kebiasan yang mengsubordinasi perempuan agar terkait. Hal-hal tersebut dapat diperoleh bersama melalui pemberdayaan diri sendiri.”

1.5.4 Implikasi Politik Pemberdayaan Perempuan

Pendekatan pemberdayaan menyadari adanya peran triple perempuan, serta mencari cara bagaimana kebutuhan strategic gender secara tidak langsung terpenuhi melalui pemenuhan kebutuhan praktikal gender terlebih dahulu. Pemberdayaan berikut menimbulkan dampak politik yang notabene merupakan

kebutuhan strategis namun melalui pemenuhan kebutuhan praktikal. Ada beberapa implikasi politik yang diperoleh dari pemberdayaan, diantaranya,

a. *Citizenship* (kewarganegaraan)

Pemberdayaan membuat jerih payah perempuan yang sebelumnya lebih terlihat. Hampir sebagian besar perempuan hidup dalam situasi dimana hanya pekerjaan produktif saja yang dihargai sebagai sebuah pekerjaan. Sedangkan pekerjaan di aspek reproduktif dan pengendalian komunitas dianggap sesuatu yang natural, sehingga seringkali tidak dihargai. Konsekuensinya, peran perempuan tersebut seperti tidak terlihat. Sedangkan laki-laki meskipun hanya melakukan sedikit pekerjaan dalam masyarakat, pasti akan dihargai entah lewat pemberian upah, atau secara tidak langsung melalui pemberian status atau posisi politis dalam masyarakat.

Dalam pemberdayaan mengandung elemen partisipasi. Partisipasi dalam aktifitas rumah tangga menstimulasi partisipasi perempuan dalam lingkup lain, yang lebih besar. Melalui keterlibatan aktif dalam proyek pemberdayaan, perempuan didorong untuk berpartisipasi penuh dalam komunitas. Partisipasi dilihat sebagai mekanisme penting untuk mengatasi sifat apatis, dan kurangnya kepercayaan diri dan dapat membuat perempuan terlihat di masyarakat. Hal ini membuat perempuan ikut aktif dalam kegiatan luar rumah sehingga dapat menunjukkan solusi yang dapat mereka berikan dalam masyarakat. Dalam masyarakat, hal ini meningkatkan kesadaran bahwa perempuan dapat memainkan peran penting dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat (Mosser, 1993, p.

102). Kesadaran perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam masyarakat inilah yang merupakan *sense of citizenship* yang merupakan dampak pemberdayaan.

b. Kesetaraan gender

Salah satu pemberdayaan adalah membuat perempuan merasa memiliki kontrol atas hidupnya. Peneliti Pathways menemukan dimana inisiasi pemberdayaan memasukkan dimensi agar perempuan secara aktif terhubung dalam pemikiran yang kritis serta sadar dalam lingkungannya dan berbagi proses tersebut kepada yang lainnya. Paulo Freire, menyebut ini sebagai kebangkitan kesadaran yang dikategorikan sebagai peningkatan program yang berefek transformatif.

Ketika perempuan bersama dan mengorganisasikan diri mereka untuk membuat tuntutan, membangun konstituens, dan sekutu, artinya mereka sukses dalam membuat perubahan untuk perempuan lain, dan menempatkan diri mereka sendiri sebagai efek pemberdayaan yang bersifat mobilisasi. Melalui tuntutan-tuntutan yang bersifat kolektif inilah hak-hak yang sebelumnya hanya didapatkan oleh laki-laki mulai diberikan pada perempuan, contohnya hak untuk memilih maupun dipilih.

1.5.5 Organisasi Perempuan dan pemberdayaan

Mengapa pemberdayaan perempuan perlu melalui organisasi? Seperti yang dikemukakan Whitehead seperti yang dikutip Mosser, menyatakan bahwa kita harus menyadari bahwa secara alamiah perempuan tidak dapat berada dalam kategori yang homogen. Hubungan sosial antar gender berlanjut dari satu lingkup masyarakat ke masyarakat lainnya. Sebagai tambahan, perempuan mengalami

variasi yang signifikan dalam area yang lebih luas dalam sub-ordinasi maupun ketidaksetaraan politik ekonomi, maupun sosial dimana tidak hanya terbatas pada hubungan sosial gender. Perbedaan-perbedaan inilah yang menjadi sebuah hal yang penting untuk mengidentifikasi basis solidaritas, kolaborasi dan komunalitas kepentingan (Mosser, 1993, p. 196).

Naila Kabeer, seperti yang dikutip oleh Rowlands menekankan bahwa pentingnya elemen *self-respect* dan *sense of Agency* dalam proses pemberdayaan serta membentuk kapasitas organisasional melalui proses kesadaran, membangun pembangunan kepemimpinan serta menguatkan jaringan. Mengapa dalam pemberdayaan menekankan aksi kolektif daripada pemberdayaan personal, dalam keadaan ketidakberdayaan seseorang memanifestasikan diri sendiri “ dengan perasaan “aku tidak bisa” namun pemberdayaan mengandung elemen kepercayaan diri secara kolektif yang menghasilkan perasaan “ kita bisa”.

1.5.6 Peran Dan Fungsi Organisasi Perempuan dan Pemberdayaan

Organisasi perempuan memainkan peran dalam peningkatan kesadaran dan solidaritas sama banyaknya dalam membuka kesempatan ekonomi dan menyediakan kemampuan pelatihan dan perawatan anak. Menurut Sen, organisasi perempuan dapat mengubah persepsi yang berhubungan dengan kontribusi yang dirasakan perempuan tentang pekerjaan yang menghasilkan, dan porsi mereka terhadap hak keluarga.

Organisasi perempuan juga menyediakan *entry point* menuju level masyarakat berkaitan dengan tindakan perlawanan yang berhubungan dengan isu strategis

rumah tangga seperti kekerasan dalam rumah tangga, dan pengendalian angka kelahiran, pengembangan *crisis centre* korban pemerkosaan, klinik penyembuhan perempuan, merupakan perencanaan lokal untuk membantu perempuan mendapatkan kontrol lebih besar atas tubuh dan kehidupan mereka.

Organisasi perempuan, hanya dapat bernegosiasi atas isu yang memiliki kesatuan kepentingan yang cukup, mengesampingkan penyebab perpecahan. Seiring waktu, proses ekonomi dan politik yang terjadi di masyarakat mempengaruhi dengan transformasi perbedaan yang ada dalam diri mereka seringkali memutuskan apa yang diperoleh organisasi perempuan.

1.6 Kerangka Pikir

Pemberdayaan perempuan merupakan suatu salah satu dimensi dalam pembangunan perempuan. Pemberdayaan merupakan salah satu upaya untuk memberikan “daya” pada perempuan sehingga ia mampu membuat dan menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya yang sebelumnya tidak dapat mereka lakukan. Pemberdayaan perempuan merupakan pemberdayaan yang dilakukan pada perempuan yang berada di akar rumput, sehingga langsung menyentuh pada masyarakat sebenarnya. Pemberdayaan merupakan tindakan yang kolektif, karena pemberdayaan memiliki tiga dimensi yaitu sumberdaya, *Agency*, dan *achievement*. Oleh karena itu dalam pemberdayaan, perempuan bukan hanya menjadi aktor tunggal. Namun, juga ada pihak lain yaitu organisasi perempuan yang bertindak sebagai perantara.

Pemberdayaan perempuan yang dilakukan, khususnya di Negara berkembang masih menyentuh pemenuhan kebutuhan praktis gender, namun sejatinya secara

tidak langsung memiliki tujuan strategis. Pemberdayaan perempuan dilakukan melalui organisasi perempuan karena pemberdayaan individual tidak cukup mampu membawa perubahan bagi perempuan. Namun, pemberdayaan individu tidak dapat ditiadakan, karena pemberdayaan individu merupakan *booster* bagi perempuan, sehingga ia memiliki kesadaran untuk ikut memberdayakan orang lain. Selain itu, tujuan pemberdayaan melalui organisasi adalah untuk melatih perempuan belajar mengenai kepemimpinan, *networking* dan manajemen. Pemberdayaan melalui organisasi juga memperjelas tujuan yang hendak dicapai dengan adanya pemberdayaan, karena setiap orang memiliki kepentingan masing-masing tentang apa yang hendak diperjuangkannya melalui pemberdayaan.

Pemberdayaan berkaitan dengan pola hubungan kekuasaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberdayaan merupakan tindakan yang kolektif. Itu artinya memungkinkan bahwa pasti ada aktor-aktor lain yang terlibat. Disinilah timbul *power relation* antar aktor dalam pemberdayaan. Kebanyakan contoh pemberdayaan, khususnya di negara berkembang masih dalam pemenuhan kebutuhan praktis, hal ini menimbulkan beberapa perdebatan, karena memperlambat tujuan pemberdayaan yang sebenarnya. Namun, sejatinya pemberdayaan tersebut meskipun masih dalam tataran pemenuhan kebutuhan praktis secara tidak langsung mengarah pada pemenuhan kebutuhan strategis gender.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Pemberdayaan perempuan ditawarkan oleh Kabeer mengarah pada tindakan kolektif, dibandingkan tindakan individual. Dalam keadaan

ketidakberdayaan, perempuan cenderung memmanifestasikan diri dengan perasaan “tidak bisa”, namun dengan tindakan kolektif, perasaan “saya tidak bisa” diubah menjadi “kita bisa”. Dalam pemberdayaan yang ditawarkan oleh Kabeer, aktor-aktor dalam pemberdayaan bukan hanya perempuan setempat sebagai *client*, namun juga organisasi perempuan sebagai *agent*. Hal ini mengapa pemberdayaan Kabeer lebih disebut tindakan kolektif. Kabeer juga menjelaskan, dalam pemberdayaan perempuan setidaknya ada 3 dimensi, antara lain:

a. Sumberdaya (*Resources*) , sumberdaya merupakan kondisi-kondisi bagaimana pilihan-pilihan dalam pemberdayaan dibuat. Membahas mengenai sumberdaya, seringkali dikaitkan dengan sumberdaya- sumberdaya yang bersifat actual yaitu sumberdaya ekonomi, yang dapat dilihat melalui pendapatan serta pengeluaran informan, namun sejatinya juga termasuk sumberdaya sosial, berkaitan dengan tingkat pendidikan partisipasi, selain itu modal sosial yang menentukan *Agency* seseorang. Posisi perempuan dalam rumah tangga maupun masyarakat juga merupakan sumberdaya, keterlibatan perempuan dengan aktivitas peningkatan pendapatan merupakan salah satu meningkatkan posisi perempuan dalam rumah tangga, pun demikian dengan seberapa keterlibatan perempuan, dalam organisasi perempuan juga mempengaruhi posisi perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Seseorang yang memiliki posisi dia mempunyai hak istimewa untuk menentukan peraturan, norma, serta kesepakatan sehingga pemberdayaan yang dilakukan menghasilkan dampak.

Sumberdaya dalam makna yang lebih luas diperoleh melalui banyak cara seperti hubungan sosial yang terbentuk dalam beragam institusi yang membentuk

masyarakat, dengan adanya hubungan agen pemberdaya. Konteks sumberdaya yang dikemukakan Kabeer, juga termasuk kendali (*control*), maupun kendala (*constraints*) yang terdapat di rumah tangga maupun masyarakat, misalnya kendali suami, termasuk dalam pemberian ijin perempuan untuk terlibat dalam aktivitas diluar rumah, termasuk keterlibatan dalam organisasi perempuan. Selain itu, ada tiga sumberdaya yang harus dimiliki dalam pemberdayaan berdasarkan upaya pencapaian *MDGs* seperti yang dikemukakan oleh Kabeer yaitu, akses terhadap pekerjaan yang dibayar, serta partisipasi politik.

b. *Agency*. Kabeer mendefinisikan *Agency* sebagai sebuah proses bagaimana pilihan-pilihan dibuat serta menimbulkan dampak. *Agency* menurut Kabeer sering dioperasionalkan sebagai pengambilan keputusan, namun membahas mengenai *Agency* juga berhubungan dengan *power relations*. *power relation* terdiri dari *power to* dalam pemberdayaan memiliki artian bagaimana seseorang dapat mempengaruhi orang lain, selanjutnya *power with* yaitu memiliki artian bahwa dengan pemberdayaan mengandung makna kolektif.

Hal ini bisa mengatasi masalah bersama, dan *power within*, yaitu adanya daya dari dalam untuk ikut memberdayakan diri sendiri dan orang lain. Dalam pemberdayaan, *power* dimaknai dengan 2 konotasi. *Power* dimaknai positif apabila merujuk pada kemampuan seseorang untuk menentukan pilihan hidupnya dan mengejar tujuan mereka, meskipun menghadapi pertentangan. Sedangkan, dalam makna negatif, dikaitkan dengan *power over* diartikan sebagai kemampuan satu aktor untuk mempengaruhi aktor lain melalui jalan kekerasan, ancaman, dan pemaksaan. Selain dimaknai sebagai bagian dari *decision-making* dan *power*

relations, motivasi, tujuan serta makna dari bagaimana perempuan melakukan perannya di rumah tangga maupun masyarakat merupakan bagian dari *sense of Agency*.

c. Pencapaian (*Achievement*), menurut Sen seperti yang dikutip dari Kabeer menyatakan bahwa adanya sumberdaya (*resources*) yang kemudian *Agency* menjadikan suatu kemampuan serta potensi seseorang untuk hidup sesuai yang mereka inginkan, atau pencapaian nilai dari "*being and doing*" dalam tujuan mereka, maka nilai dari pencapaian ini merupakan *outcomes* dari *Agency*.

Beberapa ahli yang menyepakati pemberdayaan sebagai proses daripada sebuah tujuan, sepakat bahwa pencapaian dari suatu pemberdayaan merupakan sumberdaya untuk memulai pemberdayaan yang lain. Pencapaian pemberdayaan yang paling awal dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan praktis gender, atau sering dikaitkan dengan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dimana erat kaitannya dengan kebutuhan ekonomi, namun daripada itu pencapaian yang didapat dengan adanya pemberdayaan adalah melalui partisipasi politik maupun partisipasi perempuan dalam kegiatan di masyarakat, hal ini berkaitan sebagai bentuk kesadaran perempuan akan isu-isu sosial di lingkungan sekitarnya (*conscientization*) atau berkaitan dengan *critical consciousness* perempuan, serta bagaimana perempuan ikut ambil bagian dalam pemecahan masalah, selain itu pencapaian pemberdayaan juga dilihat bagaimana perempuan mulai mempercayai nilai norma gender yang bersifat non-tradisional, artinya perempuan mulai menyadari bahwa beberapa norma tentang gender tradisional yang turun temurun di masyarakat cenderung merepresentasikan ketidaksetaraan gender.

1.8 Metode Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

1.8.1 Penelitian Kualitatif

Secara teoritis format penelitian kualitatif berbeda dengan format penelitian kuantitatif. Perbedaan tersebut terletak pada kesulitan dalam membuat desain penelitian kualitatif, karena pada umumnya penelitian kualitatif yang tidak berpola.

Selanjutnya peneliti akan memberikan gambaran tentang fenomena yang terjadi mengenai bagaimana strategi pemberdayaan yang dilakukan antara Muslimat NU dan Desa Tuwel Kabupaten Tegal dalam pemberdayaan perempuan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007, p. 5).

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya dijelaskan oleh David Williams seperti yang dikutip Moleong mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah (Moleong, 2007, p. 5).

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Objek penelitian adalah obyek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah keseluruhan sumber daya manusia yang ada Muslimat NU Desa Tuwel yang menjadi objek penelitian yaitu kerjasama yang dilakukan antara Muslimat NU Desa Tuwel Kabupaten Tegal dalam pemberdayaan perempuan.

1.8.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sample*.

Purposive sample adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014, p. 85). Pemilihan informan secara *purposive* pada

penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Pengambilan informan harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b. Subjek yang diambil sebagai informan benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key subjectis).
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang strategi pemberdayaan Muslimat NU Desa Tuwel Kabupaten Tegal dalam pemberdayaan perempuan.

Peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat ialah Pengurus Muslimat NU Desa Tuwel Kabupaten Tegal. Dari informan kunci ini selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi untuk memilih informan-informan berikutnya, dengan catatan informan-informan tersebut merasakan dan menilai kondisi lingkungan kerja sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapatkan dari informan pertama. Informan selanjutnya dari penelitian ini adalah perempuan terutama ibu-ibu anggota Muslimat NU Desa Tuwel Kabupaten Tegal.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Apabila dilihat dari segi cara, pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, kuesioner (angket), dokumentasi, dan gabungan/triangulasi dari keempatnya (Sugiyono, 2014, p. 225). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi serta studi pustaka.

1. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi. Sasaran wawancara mendalam ialah menyelenggarakan wawancara yang memungkinkan para responden membahas secara mendalam sebuah subyek (Basuki, 2006, p. 173).

Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan

wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian.

Peneliti harus memperhatikan cara-cara yang benar dalam melakukan wawancara, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pewawancara hendaknya menghindari kata yang memiliki arti ganda, taksa, atau pun yang bersifat ambiguitas.
- b. Pewawancara menghindari pertanyaan panjang yang mengandung banyak pertanyaan khusus. Pertanyaan yang panjang hendaknya dipecah menjadi beberapa pertanyaan baru.
- c. Pewawancara hendaknya mengajukan pertanyaan yang konkrit dengan acuan waktu dan tempat yang jelas.
- d. Pewawancara seyogyanya mengajukan pertanyaan dalam rangka pengalaman konkrit si responden.
- e. Pewawancara sebaiknya menyebutkan semua alternatif yang ada atau sama sekali tidak menyebutkan alternatif.
- f. Dalam wawancara mengenai hal yang dapat membuat responden marah ,malu atau canggung, gunakan kata atau kalimat yang dapat memperhalus.

2. Studi Pustaka

Yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumen menurut merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2014, p. 240). Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai pemberdayaan yang dilakukan antara Muslimat NU Desa Tuwel Kabupaten Tegal dalam pemberdayaan perempuan.

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

1.8.4.1 Sumber Data

Sumber data dapat dibedakan menjadi dua (Sugiyono, 2014, p. 225), yaitu,

a. Sumber data primer

Sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain-lain.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bognan & Biklen (1982) sebagaimana dikutip Moleong, adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. McDrury seperti yang dikutip Moleong menyatakan tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data,
- b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
- c. Menuliskan 'model' yang ditemukan.
- d. Koding yang telah dilakukan.

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi obyek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut.

Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, selanjutnya peneliti harus membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan.

Abstraksi yang sudah dibuat dalam bentuk satuan-satuan yang kemudian dikelompokkan dengan berdasarkan taksonomi dari domain penelitian. Analisis Domain adalah memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek/penelitian atau situasi sosial (Moleong, 2007, p. 248). Peneliti memperoleh domain ini dengan cara melakukan pertanyaan grand dan minitour. Sementara itu, domain sangat penting bagi peneliti, karena sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Mengenai analisis taksonomi yaitu dengan memilih domain kemudian dijabarkan menjadi lebih terinci, sehingga dapat diketahui struktur internalnya.

1.8.6 Kredibilitas Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kredibilitas penelitian kualitatif adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian.

Moleong mengemukakan beberapa upaya untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut,

a. Perpanjangan pengamatan

Peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan untuk mengetahui kebenaran data yang telah diperoleh maupun untuk menemukan data-data yang baru.

b. Meningkatkan ketekunan

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan tersebut, maka peneliti akan melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak.

c. Triangulasi

Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

d. Analisis kasus negative

Peneliti mencari data yang berbeda atau yang bertentangan dengan temuan data sebelumnya. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.

e. Mengadakan member check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut sudah valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan

pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.